

# **PENERAPAN KONSEP *WHAT'S THE PROBLEM REPRESENTED TO BE APPROACH* DALAM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA: STUDI KASUS PASAR DESA CIPEUNDEUY, KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Savanna Fransisca Sylvia Manuel  
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP, Universitas Diponegoro,  
Semarang-Indonesia  
[Savannamanuel@students.undip.ac.id](mailto:Savannamanuel@students.undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat dibentuk dengan fokus pada pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy. Sejak tahun 2022, pengelolaan pasar dialihkan dari pemerintah desa ke BUMDes sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan efisiensi pengelolaan aset desa. Namun, proses ini memunculkan berbagai masalah bagi para pedagang pasar, termasuk kenaikan biaya sewa kios yang signifikan, pemeliharaan fasilitas yang tidak optimal, dan kebijakan relokasi pasar yang memberatkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses problematisasi kebijakan tersebut melalui pendekatan *What's the Problem Represented to Be?* (WPR), yang diperkenalkan oleh Bacchi, serta Teori Elit. WPR digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana masalah-masalah yang muncul diidentifikasi dan direpresentasikan dalam kebijakan pembentukan BUMDes, sementara Teori Elit digunakan untuk memahami peran aktor-aktor berkuasa dalam proses kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan awal pembentukan BUMDes adalah meningkatkan efisiensi dan kemandirian pengelolaan aset desa, kebijakan ini lebih menguntungkan pemerintah desa dan kelompok elit lokal dibandingkan para pedagang. Kenaikan harga sewa kios yang drastis dan program relokasi pasar yang memberatkan pedagang menunjukkan ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil dan kepentingan pedagang pasar. Selain itu, jabatan dalam BUMDes cenderung didominasi oleh kepentingan politik lokal, mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga memunculkan dinamika kekuasaan lokal yang memperburuk keadaan.

Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan publik yang terlihat baik di permukaan dapat memunculkan ketidakadilan bagi kelompok yang lebih lemah. Dengan menggunakan pendekatan WPR, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa kebijakan BUMDes di Desa Cipeundeuy bukan hanya masalah efisiensi pengelolaan aset desa, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik elit lokal yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat umum, khususnya para pedagang. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan BUMDes ke depan, terutama dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan.

**Kata Kunci:** Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Elit, Pasar Desa, *What's The Problem Represented to Be Approach* (WPR Approach)

## **ABSTRACT**

*The Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Cipeundeuy Village, West Bandung Regency, was established with a focus on managing the Cipeundeuy Village Market. Since 2022, market management has been transferred from the village government to BUMDes as part of efforts to enhance village economic independence and improve the efficiency of village asset management. However, this process has led to various issues for market traders, including a significant increase in kiosk rental fees, suboptimal facility maintenance, and burdensome market relocation policies.*

*This research uses a descriptive qualitative method to analyze the problematization of these policies through the What's the Problem Represented to Be? (WPR) approach, introduced by Bacchi, along with Elite Theory. WPR is employed to explore how emerging problems are identified and represented within BUMDes policy formulation, while Elite Theory helps to understand the role of powerful actors in the policy process.*

*The research findings indicate that although the initial goal of establishing BUMDes was to improve the efficiency and independence of village asset management, the policy primarily benefits the village government and local elites rather than market traders. The drastic increase in kiosk rental prices and burdensome market relocation programs reveal a misalignment between the policies and the traders' interests. Additionally, positions within BUMDes tend to be dominated by local political interests, ignoring community participation in decision-making processes, thereby exacerbating local power dynamics.*

*This research is important because it provides a deeper understanding of how seemingly beneficial public policies can lead to injustices for weaker groups. By using the WPR approach, this study reveals that BUMDes policy in Cipeundeuy Village is not merely a matter of asset management efficiency, but also heavily influenced by local political elite interests, often neglecting the general welfare of the community, especially the traders. These findings are expected to serve as a basis for improving future BUMDes policies, particularly in increasing community participation and policy transparency.*

**Keywords:** *Village-Owned Enterprises (BUMDes), Elite Theory, Village Market, What's the Problem Represented to be Approach*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan pasar desa merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia. Pasar desa, sebagai tempat aktivitas ekonomi masyarakat desa, berfungsi tidak hanya sebagai pusat perdagangan tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola aset desa, salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sekaligus memberdayakan masyarakat desa.

Desa Cipeundeuy, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, adalah salah satu desa yang telah membentuk BUMDes dengan tujuan untuk mengelola Pasar Desa Cipeundeuy. BUMDes Anugrah Karya Mandiri didirikan pada tahun 2022 untuk mengelola pasar desa yang sebelumnya dikelola langsung oleh pemerintah desa. Pembentukan BUMDes ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pasar dan mendorong peningkatan PADes. Pengelolaan pasar desa melalui BUMDes

tidak hanya dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan desa tetapi juga untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, terutama para pedagang yang berjualan di pasar.

Namun, sejak peralihan pengelolaan pasar dari pemerintah desa ke BUMDes, muncul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh para pedagang pasar. Di satu sisi, BUMDes berhasil meningkatkan PADes secara signifikan, dari Rp 114.454.500 pada tahun 2022 menjadi Rp 321.881.000 pada tahun 2023. Di sisi lain, para pedagang merasa kebijakan ini memberatkan mereka, terutama terkait dengan kenaikan harga sewa kios, pemeliharaan fasilitas yang tidak optimal, serta kebijakan relokasi pasar yang dinilai menambah beban keuangan pedagang. Kebijakan relokasi pasar, yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi fisik pasar dan meningkatkan kenyamanan berjualan, justru menjadi kontroversi karena harga kios yang baru dinilai terlalu mahal bagi pedagang kecil.

Pendekatan *What's the Problem Represented to Be?* (WPR) yang dikembangkan oleh Bacchi (2014) menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pembentukan BUMDes ini merepresentasikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa, khususnya pedagang pasar. WPR mengajak kita untuk tidak

hanya melihat kebijakan dari segi teknis atau administratif, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut memformulasikan dan merepresentasikan masalah sosial yang mendasarinya. Kebijakan publik sering kali berangkat dari asumsi-asumsi tertentu tentang apa yang dianggap sebagai masalah yang perlu dipecahkan. Dalam konteks pengelolaan pasar desa, masalah yang direpresentasikan oleh pembentukan BUMDes adalah ketidakefisienan dalam pengelolaan pasar dan potensi PADes yang belum optimal. Namun, dari perspektif pedagang, masalah yang lebih mendasar adalah beban ekonomi yang semakin berat akibat kenaikan biaya sewa kios dan kebijakan relokasi.

Selain dari perspektif ekonomi, pengelolaan pasar melalui BUMDes juga terkait erat dengan dinamika kekuasaan di tingkat desa. Dalam hal ini, teori **elit** yang dikemukakan oleh Mosca, menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali dikuasai oleh kelompok elit yang memiliki kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya. Elit lokal di desa, seperti kepala desa dan tokoh masyarakat, sering kali memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam banyak kasus, kelompok elit ini menentukan arah kebijakan yang lebih menguntungkan bagi mereka sendiri dibandingkan bagi masyarakat luas. Di Desa Cipeundeuy, kepala desa dan

pengurus BUMDes merupakan aktor utama dalam proses pengambilan kebijakan terkait pengelolaan pasar. Hal ini memperlihatkan bagaimana kebijakan BUMDes lebih banyak merepresentasikan kepentingan elit lokal, seperti peningkatan PADes dan keuntungan finansial, dibandingkan kepentingan para pedagang pasar yang justru merasa terbebani oleh kebijakan tersebut.

Teori elit menjelaskan bahwa dalam setiap masyarakat, terdapat segelintir kelompok yang memiliki kekuasaan dan sumber daya untuk mengontrol proses pengambilan keputusan. Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto menyebutkan bahwa kekuasaan dipegang oleh elit politik yang kecil tetapi memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan. Dalam konteks Desa Cipeundeuy, kepala desa dan pengurus BUMDes dapat dikategorikan sebagai elit lokal yang memiliki otoritas penuh dalam mengelola aset desa, termasuk pasar. Ketika kebijakan terkait pasar desa diambil, suara pedagang kecil sering kali diabaikan atau tidak dianggap sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, kebijakan yang diambil cenderung mencerminkan kepentingan elit desa yang menguasai akses terhadap sumber daya desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pembentukan BUMDes Anugrah Karya

Mandiri di Desa Cipeundeuy merepresentasikan masalah yang ada, serta bagaimana kebijakan ini dipengaruhi oleh kekuatan elit lokal. Dengan menggunakan pendekatan WPR, penelitian ini akan mengungkap siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh kebijakan ini dan siapa yang dirugikan. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana kebijakan ini mencerminkan dinamika kekuasaan lokal di Desa Cipeundeuy, di mana kepala desa dan pengurus BUMDes memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan WPR dan teori elit sangat relevan untuk mengkaji kebijakan pengelolaan BUMDes di Desa Cipeundeuy karena kebijakan ini melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Kepala desa sebagai pengambil kebijakan utama memiliki kepentingan yang katanya untuk meningkatkan PADes dan memperbaiki infrastruktur pasar, sedangkan pada faktanya ternyata tidak seperti itu, sementara pedagang pasar lebih memperhatikan keberlanjutan bisnis mereka dan kestabilan biaya operasional. Dalam hal ini, kebijakan BUMDes tampak lebih banyak menguntungkan elit lokal yang memiliki kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan, sementara pedagang yang merupakan aktor ekonomi utama di pasar kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, analisis kebijakan menggunakan

WPR dapat mengungkap bagaimana representasi masalah dalam kebijakan ini tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan semua pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam bagaimana kebijakan pembentukan BUMDes di Desa Cipeundeuy merepresentasikan masalah yang ada di masyarakat, terutama terkait dengan pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas hubungan antara kebijakan publik, kekuasaan elit, dan kepentingan masyarakat dalam konteks lokal. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran rinci tentang proses pengambilan kebijakan, dinamika kekuasaan lokal, serta dampak kebijakan terhadap pedagang pasar.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di Pasar Desa Cipeundeuy untuk melihat bagaimana kebijakan pengelolaan pasar diterapkan di lapangan, termasuk kondisi fisik pasar dan interaksi antara pedagang dan pengelola pasar. Wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposive, termasuk kepala desa, pengurus

BUMDes, serta pedagang pasar. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi mereka tentang kebijakan pengelolaan pasar, termasuk manfaat dan dampak kebijakan bagi mereka.

Teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen resmi dibandingkan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. Dengan triangulasi ini, peneliti dapat mengecek kredibilitas data dan mengurangi kemungkinan bias yang mungkin timbul dari penggunaan satu sumber data saja.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka WPR yang dikembangkan oleh Bacchi (2014). WPR menawarkan enam pertanyaan utama yang digunakan sebagai panduan dalam menganalisis kebijakan: (1) Apa ‘masalah’ yang direpresentasikan dari kebijakan yang terbentuk? (2) Apa prasangka dan asumsi yang direpresentasikan dari ‘masalah’ tersebut? (3) Bagaimana representasi ‘masalah’ ini dapat terjadi (4) Apa hal yang tidak turut bernilai bermasalah dalam representasi masalah tersebut? Mengapa ada keheningan terhadap representasi tersebut? Apakah ‘masalah’ ini dapat dipikirkan secara berbeda melalui perspektif lain? (5) Apa efek yang dihasilkan dari representasi ‘masalah’ tersebut? (6) Bagaimana atau dari

mana representasi dari ‘masalah’ ini berasal dan dipertahankan? Bagaimana masyarakat dapat mempertanyakan dan mengkritik representasi ‘masalah’ ini? Dengan menggunakan kerangka ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana kebijakan BUMDes di Desa Cipeundeuy merepresentasikan masalah, serta bagaimana kebijakan ini menciptakan dampak yang berbeda bagi aktor-aktor yang terlibat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan BUMDes Anugrah Karya Mandiri di Desa Cipeundeuy merepresentasikan masalah dari sudut pandang pemerintah desa, terutama terkait dengan upaya meningkatkan PADes dan memperbaiki infrastruktur pasar. Pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa, melihat pengelolaan pasar sebagai kesempatan untuk mengoptimalkan aset desa dan meningkatkan pendapatan desa. Dalam kerangka ini, masalah utama yang direpresentasikan adalah ketidakefisienan pengelolaan pasar yang dilakukan oleh pemerintah desa sebelumnya. Dengan demikian, pembentukan BUMDes dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar.

Namun, dari perspektif pedagang, kebijakan ini menimbulkan masalah baru, terutama terkait dengan kenaikan harga sewa kios dan kebijakan relokasi pasar. Pedagang merasa bahwa kenaikan harga sewa kios tidak sebanding dengan peningkatan fasilitas yang ditawarkan. Sebelum pengelolaan pasar diambil alih oleh BUMDes, harga sewa kios relatif terjangkau. Namun, setelah pengelolaan diserahkan kepada BUMDes, harga sewa meningkat drastis, bahkan mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya. Hal ini menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi pedagang, terutama bagi mereka yang berjualan produk-produk dengan margin keuntungan rendah, seperti sayuran dan kebutuhan pokok lainnya.

Kebijakan relokasi pasar juga menjadi isu yang kontroversial. Relokasi pasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi pasar dan meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli ternyata menambah beban bagi pedagang. Para pedagang diharuskan membayar biaya tambahan untuk mendapatkan kios baru di lokasi relokasi, yang harganya jauh lebih mahal daripada kios lama. Banyak pedagang yang merasa tidak mampu membayar harga kios baru tersebut, sehingga mereka terpaksa pindah ke lokasi lain atau bahkan berhenti berjualan.

Dari analisis WPR, terlihat bahwa kebijakan ini merepresentasikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa, yaitu bagaimana meningkatkan PADes dan memperbaiki infrastruktur pasar. Asumsi yang mendasari kebijakan ini adalah bahwa dengan meningkatkan PADes dan memperbaiki kondisi fisik pasar, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat. Namun, asumsi ini tidak sepenuhnya memperhitungkan dampak kebijakan terhadap pedagang, yang merupakan aktor utama dalam aktivitas ekonomi pasar. Pedagang merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan ini, dan bahwa kepentingan mereka diabaikan.

Hasil penelitian ini mengungkap adanya dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan pasar di Desa Cipeundeuy. Menurut teori elit yang dikemukakan oleh Mosca dan Pareto, kelompok elit dalam masyarakat memiliki kontrol yang kuat terhadap sumber daya dan proses pengambilan keputusan. Di Desa Cipeundeuy, kepala desa dan pengurus BUMDes dapat dikategorikan sebagai bagian dari elit lokal yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebijakan terkait pengelolaan pasar. Mereka memanfaatkan posisi kekuasaan mereka untuk mempromosikan kebijakan yang

mendukung kepentingan mereka sendiri, seperti peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta pengelolaan pasar yang lebih menguntungkan secara finansial.

Dalam hal ini, kebijakan yang diambil lebih banyak mencerminkan kepentingan elit lokal daripada kepentingan para pedagang pasar. Kepala desa, sebagai pemimpin tertinggi di desa, memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang kuat dalam meningkatkan PADes untuk mempertahankan dukungan politik dari warga desa. Sementara itu, pengurus BUMDes, yang dipilih langsung oleh kepala desa, cenderung mendukung kebijakan yang lebih menguntungkan elit lokal daripada masyarakat luas. Akibatnya, kepentingan para pedagang yang berada di lapisan ekonomi bawah sering kali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Pedagang pasar merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan atau pengaruh untuk mengubah atau mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes.

Situasi ini mencerminkan bagaimana kekuasaan elit lokal, terutama kepala desa dan pengurus BUMDes, memainkan peran sentral dalam menentukan arah kebijakan di desa. Kepala desa, sebagai aktor politik yang memiliki otoritas besar di tingkat desa, memiliki kepentingan untuk meningkatkan PADes serta mempertahankan dukungan politik

dari warganya. Dalam konteks ini, para pengurus BUMDes yang ditunjuk oleh kepala desa juga cenderung membuat kebijakan yang lebih menguntungkan elit lokal dibandingkan dengan kepentingan para pedagang pasar yang harus menanggung beban dari kebijakan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pembentukan BUMDes Anugrah Karya Mandiri di Desa Cipeundeuy berhasil meningkatkan PADes secara signifikan, namun kebijakan ini menimbulkan sejumlah masalah bagi pedagang pasar. Kenaikan harga sewa kios dan kebijakan relokasi pasar menjadi isu utama yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pedagang. Meskipun tujuan awal kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pasar dan memperbaiki kondisi pasar, kebijakan ini lebih banyak menguntungkan elit lokal daripada pedagang pasar yang merupakan aktor utama dalam aktivitas ekonomi di pasar desa.

Dari perspektif WPR, kebijakan ini merepresentasikan masalah dari sudut pandang pemerintah desa, sementara kepentingan pedagang kurang diperhatikan. Kebijakan ini juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi kekuasaan di tingkat desa, di mana kepala desa dan pengurus BUMDes memiliki kontrol penuh dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Partisipasi pedagang dalam proses pengambilan keputusan sangat minim, sehingga kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kepentingan mereka.

## SARAN

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pembentukan BUMDes Anugrah Karya Mandiri di Desa Cipeundeuy, beberapa langkah perbaikan perlu diterapkan. Pertama, penting untuk meningkatkan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat guna memastikan bahwa kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat terakomodasi. Selain itu, proses pengisian jabatan di BUMDes perlu dilakukan dengan transparan dan adil, dengan memastikan bahwa semua kandidat memiliki kesempatan yang sama dan menghindari pengaruh kepentingan politik lokal. Pengawasan independen dan keterlibatan masyarakat dalam seleksi jabatan dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah desa dan pengurus BUMDes.

Selanjutnya, kebijakan terkait relokasi pasar dan peningkatan harga sewa kios harus dipertimbangkan secara hati-hati, dengan melakukan studi dampak ekonomi untuk memahami efeknya terhadap pedagang. Jika relokasi

diperlukan, pemerintah desa sebaiknya memberikan dukungan seperti subsidi atau bantuan untuk mengurangi beban ekonomi pedagang, serta mempertimbangkan opsi yang lebih menguntungkan bagi mereka. Untuk menyelesaikan ketidakpuasan dan konflik, pemerintah desa perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif, seperti forum pengaduan atau mediasi, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajisola, S. I. (2023). The Elite Theory in the Context of Public Policy Making. *International Journal of Emerging Multidisciplinaries: Social Science*, 1-6.
- Bacchi, C. (2014). *Analysing Policy: What's the problem represented to be?* Malaysia: Pearson Australia.
- Bacchi, C. (2021). *Introducing WPR: A Work in Progress*.
- Bahri, M. S., & Rohim. (2020). Dominasi Elit Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah "Cahaya Ilmu,"* 81-95.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif,*

- Kuantitatif, dan Campuran. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Damele, G., & Campos, A. S. (2022). Introduction. *Elite Theory: Philosophical Challenges*. 1-7.
- Delican, M. (2000). Elite theories of Pareto, Mosca and Michels. *Sosyal Siyaset Konferanslari Dergisi (43)*, 323–336.
- Du, Y. (2016). *What is the Problem Represented to be? A problematisation on two child policy in China*. Retrieved from Lund University Lund University Publications: <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=8904627&fileId=8904631>
- Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADes di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). 19-39.
- Firdaus, S. (2018). Fenomena elite capture dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi kasus strategi bekerjanya kekuasaan elite dalam pengelolaan BUMDes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pematang. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 20-37.
- Hamariu, F., Noak, P. A., & Erawan, I. K. (2021). Peran Elite Lokal dalam Pemekaran Desa (Studi Kasus Desa Pindi Wangga Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur). 1-9.
- Jepri, A. (2019). Strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi melalui BUMDes program pasar desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4), 303-310. Retrieved from <http://www.publikasi.unitri.ac.id>
- Mariotti, C. (2020). Elite Theory. In A. Bitoni, P. Harris, C. S. Fleisher, & A. K. Binderkrantz, *The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs*. Springer.
- Martono, N. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mosca, G. (1939). *The Ruling Class*. New York: McGraw-Hill.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Osborne, T. (1997). On Health and Statecraft. In A. Petersen, & R. Buntun, *Foucault, Health and Medicine* (pp. 173-188). London: Routledge.

- Suprojo, F. H. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 367-371.
- Ufford, P. Q. (1988). Kepemimpinan lokal dan implementasi program. Jakarta: PT Gramedia.
- Wijaya, T. (2018). Manajemen Kualitas Jasa. Jakarta: PT.Indeks.